

## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH (BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI)**

**Erwin Hadisantoso<sup>1</sup>, Fitriaman<sup>2</sup>, Apriyanti<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

*Email: apriyantiansar@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak di pemerintah kota Kendari. Objek penelitian ini dilakukan di badan pendapatan daerah kota Kendari. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan, dengan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui penyebaran angket atau kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah kota Kendari menunjukkan kriteria baik. Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah kota Kendari sudah termasuk dalam kategori sangat baik.

**Kata Kunci:** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the data on the implementation of the regional financial accounting system (SAKD) on the accountability of tax revenues in the kendari city government. The object of this research was carried out at the kendari city regional revenue agency. The type of data used is qualitative data. The data source used is primary data. Data collection was carried out by means of field research, with direct data collection techniques through the distribution of questionnaires or quistionnaires. The method used in this research is descriptive verification method. The application of the regional financial accounting system to the regional revenue service for the city of kendari shows good criteria. Accountability of local tax revenues at the kendari city Regional Revenue Agency is included in the very good category.*

**Keywords:** regional financial accounting system, accountability of local tax revenues

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya pemborosan waktu kerja menjadi masalah di Dispenda dalam pengelolaan pajak daerah, dikarenakan masih menggunakan sistem manual serta penggunaan sistem yang terkomputerisasi belum digunakan secara maksimal. Peranan system informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Pemendagri 59 Tahun 2007. Sistem ini berbasis pada jairngan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) dengan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dengan baik. Sistem Informasi kauntansi merupakan sistem akuntansi yang berbasis relational database dengan pola database tersentralisir (*centralized single database*) yang dapat diakses oleh seluruh unit pemrosesan pola database ini sebagai perangkat andalan yang sangat diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Adapun manfaat penerapan sistem informais akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat diterapkan secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan system akuntansi keunagn daerah. Dengan demikian, dalam system akuntansi keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh ditunjukkan uantum menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan baik pihak internal maupun pihak eksternaldalam pemerintahan daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Dalam mengembangkan sistem akuntansi keuangan ini maka pertimbangan kepentingan dari berbagai pihak harus dapat terakomodir salah satu pihak yang mungkin berbeda persepsi adalah kepentingan pihak pemerintahan dengan mengutamakan pelayanan publik dengan kepentingan investor yang mengutamakan kepentingan swasta. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik

dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam menncapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic (santubry, 2003).

Fenomena yang terjadi diatas menunjukkan bahwa semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkenan dengan hal tersebut, penciptaan akuntansibilitas public harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Arus reformasi yang terjadi saat ini juga menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengolahan pemerintah yang bai (*good government governance*). Tuntutan transparasi public kinerja yang baik dan akuntabilitas sering ditunjukan kepada pemerintah daerah. Suatu system informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan internal control dan eksternal control yang baik. Sehubungan dengan hal ini maka peran dari dewan semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah, faktor internal yang dimiliki oleh dewan dan berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya pengawasan anggaran, dan faktor eksternal diantaranya adanya partisipasi masyarakat.

Fenomena yang berlaku saat ini pada Pemerintah Kota Kendari adalah sebagai berikut :

1. Mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari tahun 2016-2020 dari hasil pemeriksaan oleh BPK (Badan Pengawasan Keuangan).  
Sumber: IHPS Semester 1 2020
2. Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Kota Kendari Mendapatkan Nilai B  
Nilai B berarti 60-80.
3. Lemahnya Sistem Pengadilan dan Pelaporan Akuntansi dalam Aset tetap. Aset tetap tidak diketahui keberadaanya dan tidak didukung bukti kepemilikan, belum didukung pengamanan fisik yang memadai. Selain itu, aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan dan saluran irigasi serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum dicatat.  
Sumber: IHPS Semester 1 2020

Hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti atas akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yaitu Belum efektifnya penggunaan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan belum tercapai akuntabilitas BAPENDA terhadap publik terutama atas pelaporan keuangannya pada hasil pendapatan pajak daerah dikarenakan sistem pencatatan yang diterapkan masih kurang optimal sehingga transparansi dan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya tercapai.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, terdapat salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang pernah dilakukan oleh R.Fenny Syafariani & Evi Feryan (2019) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan sistem informasi akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan kriteria Baik. Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah termasuk dalam kategori baik.

serta Terdapat hubungan yang erat dan searah antara sistem informasi akuntansi dengan Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel dependen. R.Fenny Syafariani & Evi Feryani meneliti Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan penulis meneliti tentang Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah. Sedangkan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen. Alasan memilih variabel tersebut karena penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak di Pemerintah Kota Kendari.

## **2. LANDASAN TEORI**

Menurut Krismiaji (2013:1) “sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk merangkai serangkaian tujuan” sedangkan menurut Widjanto (2008:2):“system adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses dan output”. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen berbeda yang dengan cara tertentu saling berkaitan dan berproses dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Menurut Abdul Halim (2012:35) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Jadi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Azhar Susanto (2008:65) menguraikan Sistem Teknologi Informasi sebagai berikut Sistem teknologi informasi bermula dari memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa dan transaksi ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal pemerintah daerah setelah itu melakukan editing, verifikasi, dan validasi untuk menjamin bahwa data yang dimasukkan sudah lengkap, akurat dan sah. Sedangkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (1) memuat penggunaan komputer dalam SAKD yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Menurut Mahmudi (2015:9) Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Menurut Mardiasmo (2012:20) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintan pertanggungjawaban tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Sektor Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik melalui media pertanggungjawaban yang disusun secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontrak prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Mahmudi (2015:51) Akuntansi berperan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi pemerintah bagi masyarakat” sementara menurut Abdul Halim (2012:35) Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam peneglolaan keuangan daerah dapat dicapai. Indra Bastian (2007:15) menambahkan Sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk pertanggungjawaban, hal ini berlaku tidak hanya di setor swasta melainkan juga di sektor publik terlebih sejak era reformasi tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana semakin besar. Berdasarkan teori diatas, menunjukan bahwa setelah Pemerintah Daerah/Kabupaten dan kota yang sudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara konsisten dan menyeluruh maka akan mewujudkan Akuntabilitas Publik khususnya pada Pendapatan Pajak Daerah yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

### **3. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, yang berlokasi di Kampus Hijau Bumi Tridharma Jalan H.E.A. Mokodompit, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh persepsi Mahasiswa akuntansi mengenai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sebagai variabel independen, terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi sebagai variabel dependen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif verifikatif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Pemerintah Kota Kendari. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan pegawai negeri sipil yang ada pada Pendapatan Pendapatan Daerah Kota Kendari sebanyak 115 orang. Penentuan sampel yaitu dengan menggunakan metode sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai objek atau responden penelitian yakni 115 pegawai. Dalam melakukan pengumpulan data, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data primer, penulis memperoleh data langsung dari pihak pertama yaitu kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di setiap Satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk memperoleh data yang harus diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui penyebaran angket atau kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk variabel X dan variabel Y. Alat untuk mengukur variabel- variabel dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dalam melakukan pengukuran skala yang digunakan adalah skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Model analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak. Untuk menganalisis data maka digunakan model statistika analisis regresi sederhana (single regression analysis). Secara aljabar hubungan tersebut dapat ditulis seperti persamaan berikut ini.

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel tak bebas  
 a = Konstanta  
 b<sub>1</sub> = Koefisien regresi  
 X<sub>1</sub> = Variabel bebas

e = Factor kesalahan (error)

Implementasi persamaan di atas dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Keterangan:

a = Konstanta  
 Y = Akuntabilitas pendapatan pajak  
 X<sub>1</sub> = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  
 b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi dari Variabel  
 e = term of error atau variabel yang tidak diteliti.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan tingkat kepercayaan 95 % atau  $\alpha = 5\%$ .

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear diperoleh hasil seperti dalam Tabel 1

**Tabel 1**  
**Hasil Analisis Regresi Linaer sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.622	.484		4.489	.000
1 Penerapan SAKD	.366	.134	.266	2.735	.007

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pendapatan Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 2,622 + 0,266 X_1 + 0,484$$

1. Nilai konstanta (*intercept*) sebesar 2,622 artinya bahwa jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) mengalami perubahan maka akuntabilitas pendapatan pajak akan berubah secara proporsional. Koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan linier antar variabel x dan y maka nilai konstanta diabaikan.
2. Koefisien regresi x untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) bernilai positif 0,266 artinya bahwa pengaruh variabel SAKD searah dengan peningkatan akuntabilitas pendapatan pajak daerah di kota Kendari. Dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel SAKD mempunyai pengaruh positif dalam mempengaruhi akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat membuktikan

bahwa semakin baik/tinggi penerapan SAKD maka dapat memberikan kontribusi positif terhadap perubahan akuntabilitas pendapatan pajak daerah di kota Kendari.

3. Dari tampilan output hasil SPSS bahwa *Standart error* (SE) sebesar 0,484 yaitu makin kecil nilai SE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi (R Square)**

Model	Model Summary <sup>b</sup>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.466 <sup>a</sup>	.371	.261	.40507	1.320

a. Predictors: (Constant), Penerapan SAKD

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pendapatan Pajak

Sumber: Hasil Penelitian, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel Model Summary tersebut diperoleh nilai ( $R^2$ ) sebesar 0,371 yang artinya bahwa kemampuan variabel independen yaitu penerapan SAKD dapat menjelaskan variasi dari variabel akuntabilitas pendapatan pajak adalah sebesar 37.1% dan sisanya sebesar 62.9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,466 menunjukkan bahwa keeratan hubungan langsung antara variabel bebas (penerapan SAKD) terhadap variabel terikat (akuntabilitas pendapatan pajak) adalah sebesar 46.6%. Hubungan ini secara statistik tergolong cukup kuat. Oleh karena itu, model regresi yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai model yang “cukup fit” atau dapat menjadi model penduga yang baik dalam menjelaskan pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 diatas maka diperoleh hasil uji yaitu Nilai koefisien standardized coefficients regresi untuk variabel penerapan SAKD bertanda positif sebesar 0,266 dan Nilai  $t$  sebesar 2.735 lebih besar dibandingkan dengan nilai 1,666, atau nilai sig  $t$  untuk variabel penerapan SAKD 0,007 lebih kecil dari alpha (0,05). Dengan demikian, dikatakan bahwa variabel penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak pada Badan Pendapatan daerah Kota Kendari Akuntabilitas pendapatan pajak dapat ditingkatkan dengan adanya penerapan SAKD. Jika penerapan SAKD baik/tinggi maka akuntabilitas pendapatan pajak yang dihasilkan akan semakin baik/tinggi.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah kota Kendari. Artinya apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik, maka akuntabilitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012:176) Akuntansi keuangan daerah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari telah berjalan dengan baik sehingga akuntabilitas pendapatan pajak daerah juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2012). Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Nurani (2016) yang menerangkan bahwa akuntabilitas publik akan tercapai dengan dilaksanakannya

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan paradigma good governance, dan juga pendapat Mardiasmo (2012) bahwa akuntansi keuangan daerah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari sudah termasuk dalam kategori baik. Artinya ditinjau dari akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, walaupun dalam akuntabilitas kebijakan masih kurang, karena kebijakan-kebijakan yang diberikan terutama dalam hal pencatatan ada laporan keuangan dan anggaran pada hasil pendapatan pajak-pajak daerahnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akuntabilitas pada pendapatan pajak daerahnya secara keseluruhan sudah dilakukan serta dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kepada pihak yang berwenang.

Penelitian ini juga membuktikan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Syafariani (2019) dan Arfianty, Asnita Virलयani (2017), bahwa apabila penerapan sistem akuntansi diterapkan dengan baik maka akuntabilitas pendapatan pajak daerah akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Mas'ut, Abdan Masrura (2018), Sri Rahmayani (2018) dan Gala (2018) juga membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pendapatan pajak.

Pendapatan Pajak Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pendapatan pajak daerah merupakan suatu bentuk peran masyarakat maka harus ada suatu pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pada proses administrasi dan dalam pengelolaannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Akuntansi diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dapat tercapai sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya dapat mengalokasikan dana yang tersedia untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari menunjukkan kriteria Baik. Dikarenakan proses kebijakan dan prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi pengumpulan, pemasukan dan pengelolaan data transaksi disimpan dengan baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi yang memerlukan. (2) Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya ditinjau dari akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial dilaksanakan dengan baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Artinya apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan

dengan baik, maka akuntabilitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Kota Kendari yaitu diantaranya (1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari agar mempertahankan maupun meningkatkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga pendapatan pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak dapat di pertanggungjawabkan. Mengirimkan pejabatnya dalam berbagai pelatihan kedinasan mengenai pengelolaan pendapatan pajak daerah. (2) Bagi Para Pegawai, Motivasi kerja setiap pegawai dan pemahaman atas fungsi dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap pegawai harus ditingkatkan lagi sehingga program-program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau target yang diinginkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ke-4. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfianty, A., & Virलयani, A. (2017). Penerapan sistem Akuntansi Keuangan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhamadiyah Palopo*, 3(2).
- Azhar, Susanto. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Gramedia.
- Danang, Sunyoto. 2016. Metode Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dedi Nordiawan, Hartianti Ayuningtyas. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indra, Bastian. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2015. Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Masrura, A. (2018). Pengaruh Penerapan sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradigma)*, 5(1).
- Moh, Nazir. 2013. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riduwan. 2013. Pengantar Statistika. Bandung: Alfabeta.
- Soleha, N. (2014). Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada SKPD Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Etikonomi*, 13(1).
- Soemarso. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Widjajanto, Nugroho. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Widana, Putra. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Bandung APBD 2014.
- Tim Dosen. 2016. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi STIE INABA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.